



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SENIN, 21 MEI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Lanjutan...

pengelolaan Mess Pemda yang akan dijadikan hotel berbintang. Belum sempat lelang ulang, Ridwan Mukti juga harus menerima pil pahit dengan ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Semua kepala daerah yang akan mengelola Mess Pemda ini terkena kasus. Ini yang semakin membuat terbengkalai aset pemprov tersebut," tambahnya.

Rencana pengelolaan Mess Pemda tidak stop disitu saja. Bengkulu yang telah memiliki pemimpin baru Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Dr H Rohidin Mersyah MMA, kembali melanjutkan rencana lelang ulang dengan meminta persetujuan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hasil koordinasi itupun disepakati oleh Kemendagri untuk lelang ulang. Pemprov tetap bulat, untuk mengelola Mess Pemda menjadi hotel berbintang.

Edison mengatakan, lelang ulang itu memang harus segera dilakukan. Pemprov tidak perlu lagi mengulur-ulur waktu untuk melakukan lelang. "Lelang ulang ini harus segera. Agar Mess Pemda selain jadi salah satu icon Bengkulu, juga bisa menarik wisatawan datang," ujarnya.

Namun demikian, Edison menegaskan, yang ikut lelang hingga pemenang lelang haruslah Group perhotelan besar. Sebab, Group perhotelan besar itu telah terbukti berpengalaman mengelola hotel berbintang. Sehingga Mess Pemda itu dapat benar-benar maksimal pengelolaannya, untuk mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD). "Yang menang nanti juga jangan asal-asalan. Groupnya harus berpengalaman dan terkoneksi dengan hotel di Indonesia. Jadi ketika ada acara, maka akan diarahkan ke Mess Pemda yang telah dijadikan hotel," tegas Edison.

Lelang Mess Pemda Lewat ULP

Sementara itu, Kepala Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu, Heru Susanto SE mengatakan, rencana lelang ulang Mess Pemda memang sedang digodok oleh pemprov. Jika tidak ada halangan, 1 Juli mendatang lelang sudah bisa dilakukan oleh pemprov Bengkulu melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). "Sekarang proses lelangnya sedang kita urus dulu," terang Heru.

Heru menjelaskan, proses lelang nantinya tetap tunduk pada Praturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2014 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik negara atau barang milik daerah. Semua pihak nantinya akan dilibatkan untuk memilih calon penyedia atau peserta lelang, sebelum dibuatkan surat keputusan (SK) keikutsertaan. "Lelang nantinya juga tetap tunduk pada Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Jadi kita akan selektif, agar tidak bermasalah dikemudian hari," tuturnya.

Sebelum memulai itu semua, pemprov akan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengukur lahan yang ada di Mess Pemda. Setelah semua lengkap, maka gubernur akan mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) termasuk SK yang berkaitan dengan teknis lelang. "Draf peraturan itu kita koordinasikan dengan OPD yang berkaitan termasuk Biro Hukum," imbuh Heru.

Ditambahkannya, penenang lelang dari pihak ketiga nantinya sesuai koordinasi dengan Kemendagri, akan dikelola dengan sistem kontrak minimal 30 tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan oleh gubernur. Kemudian sistem bagi hasilnya, minimal 10 persen dijadikan PAD untuk pemprov. "Ya kita minta doanya, agar rencana ini dapat berjalan dengan baik," pungkasnya. (151)